

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketika Otonomi Daerah dicanangkan Pemerintah Pusat pada tanggal 1 Januari 2001 tiap tiap daerah diberikan wewenang untuk mengelola sendiri daerahnya termasuk Provinsi dan Kabupaten. Tujuan dilakukannya hal itu adalah untuk memberikan efek yang lebih baik terhadap pembangunan daerah agar lebih demokratis. Tiap tiap daerah baik provinsi maupun kabupaten diberikan wewenang untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri.

Undang undang nomor 22 tahun 1999 menyerahkan fungsi, personil, dan aset pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Hal ini berarti bahwa pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dilimpahkan kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota (**Mudrajad Kuncoro, 2004**). Di semua sektor administratif pemerintah, undang undang telah memindahkan fungsi pemerintah pusat kepada daerah, dengan pengecualian dalam hal pertahanan dan keamanan, kebijakan luar negeri, masalah moneter dan fiskal (**Mudrajad Kuncoro, 2004**).

Dengan diberikannya pelimpahan wewenang yang begitu besar berarti Pemerintah Daerah juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pembangunan daerah tersebut. Didalam pembangunan daerah terdapat satu indikator penting yang perlu diperhatikan pemerintah yaitu pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi mungkin tidak bisa membuat semua orang

menjadi kaya, semua orang memiliki mobil dan memiliki rumah megah, akan tetapi maksud dari pembangunan ekonomi adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat yaitu masalah pokok pribadi seseorang sandang, pangan, dan papan yang diukur dengan pendapatan perkapita.

Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata rata penduduk. Dengan demikian, pendapatan perkapita untuk suatu tahun tertentu dihitung dengan membagi PDRB suatu daerah pada tahun tersebut dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama (**Sadono Sukirno, 2015**). PDB adalah nilai pasar dari seluruh nilai barang dan jasa jadi yang diproduksi di suatu negara pada periode tertentu (**N. Gregory Mankiw, Euston Quah, Peter Wilson, 2013**). PDB didalam konteks ini diasumsikan tingkat kemakmuran suatu negara direfleksikan oleh pendapatan rata rata yang diterima penduduknya (**Sadono Sukirno, 2015**). Semakin tinggi pendapatan tersebut, semakin tinggi daya beli penduduk, dan daya beli yang bertambah ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat (**Sadono Sukirno, 2015**).

Tujuan utama dari usaha usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran (**Mudrajad Kuncoro, 2004**). Tugas lain dari Pemerintah Daerah adalah menciptakan kesempatan kerja bagi penduduknya. Kesempatan Kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (**Mudrajad Kuncoro, 2004; Todaro 2000**).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses kerja antara Pemerintah Daerah dan Masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut **(Mudrajad Kuncoro, 2004; Arysad, 1999; Blakely, 1989)**.

Akan tetapi keharmonisan Pemerintah Daerah dan sektor swasta belum memberikan efek yang baik terhadap masyarakat. Terkadang kerjasama mereka bisa memberikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun terdapat peningkatan ketimpangan pendapatan. Jika hal itu terjadi selama bergasur angsur disuatu daerah dan meletup suatu peristiwa besar, maka akan digunakan oleh para politisi menambah bumbu isu sosial, bumbu ideologi dan bumbu separatis, hingga hal ini akan menjadi masalah besar di tingkat nasional.

Pembangunan dalam lingkup Provinsi secara spasial tidak selalu disertai pemerataan. Daerah daerah tersebut mengalami ketimpangan dikarenakan terdapatnya perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, jaringan listrik, jaringan komunikasi, dan letak pusat administratif. Hal ini tentu akan menjadi pertimbangan investor untuk menaruh sebagian sumber dayanya kepada daerah yang lebih maju seperti dekat dengan banyak tenaga kerja, dekat dengan Sumber Daya Alam (SDA), dan dekat dengan pusat birokrasi. Hal ini akan memperlebar ketimpangan suatu Provinsi. Misalnya saja di Jawa Timur pusat perekonomian berada di Surabaya dimana PDRB Surabaya sebesar 285 trilliun yaitu sebesar 23% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Provinsi Jawa Timur. PDRB sebesar itu lebih dari penjumlahan 10 Kabupaten yang ada di Jawa Timur yaitu Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi.

Selain itu terdapat fenomena langka yang jarang terjadi yaitu terdapat sebuah kota yang memiliki PDRB yang tinggi namun tidak berada di Sabuk Industri (Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik dan Pasuruan), seperti halnya di Amerika Serikat Sabuk Sillicon Valley (Sillicon Valley Belt) ataupun Sinos Valley di Brasil, kota itu adalah Kota Kediri dengan jumlah PDRB tahun 2013 sebesar 65 triliun Rupiah. Namun, kenyataan bahwa Kota Kediri memiliki PDRB yang tinggi tidak memberikan dampak yang besar terhadap daerah daerah disekitarnya misalnya Tulungagung yang memiliki PDRB tahun 2013 sebesar 20 triliun, Kota Blitar yang hanya 3 triliun rupiah pada tahun yang sama, dan Trenggalek yang hanya memiliki PDRB sebesar 9 triliun pada tahun 2013.

Sedangkan pendapatan perkapita di Provinsi Jawa Timur juga bervariasi. Sama halnya dengan PDRB, kali ini Kota Surabaya menjadi runner up untuk pendapatan perkapita yaitu sebesar Rp. 101 juta per 31 Desember 2013, sedangkan untuk pemuncak klasmen adalah Kota Kediri dengan pendapatan perkapita sebesar Rp. 235 juta. Sedangkan untuk PDRB perkapita terendah pada tahun 2013 di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Pamekasan dengan PDRB perkapita sebesar 10 juta per 31 Desember 2013. Ketimpangan ekonomi yang besar antar daerah untuk negara demokrasi seperti Indonesia tidaklah bagus. Hal ini akan menjadi masalah besar dikemudian hari.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini akan dilaksanakan penelitian yang lebih lanjut mengenai “**Analisis Ketimpangan Di Provinsi Jawa Timur Antar Kota, Antar Kabupaten, Antar Kota Dan Kabupaten Serta Antar Kota Dan Kabupaten Tanpa Kota Surabaya Dengan Pendekatan Indeks Williamson Dan Hipotesis Kurva-U Terbalik Kuznets**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat ketimpangan antar Kabupaten, antar kota, antar kota dan kabupaten serta antar kota dan kabupaten tanpa Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur ?
2. Apakah terdapat hubungan antara ketimpangan dengan PDRB perkapita antar kabupaten, antar kota, antar kabupaten dan kota, serta antar kabupaten dan kota tanpa kota Surabaya sehingga membuat kurva U terbalik ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketimpangan antar Kabupaten, antar kota, antar kota dan kabupaten serta antar kota dan kabupaten tanpa Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur
2. Untuk mengetahui hubungan antara ketimpangan dengan PDRB perkapita antar Kabupaten, antar kota, antar kabupaten dan kota, serta antar kabupaten dan kota tanpa kota Surabaya sehingga membuat kurva U terbalik

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat di peroleh manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat menambah pembendaharaan perpustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya agar dapat melengkapi apa yang kurang berkenan dalam penelitian ini dan adanya kekurangan-kekurangan pada penelitian ini.
3. Memberikan informasi kepada instansi terkait tentang ketimpangan di Provinsi Jawa Timur di berbagai kategori wilayah.